

# RENTAL ISTRI: Komodifikasi Perempuan Dalam Keluarga Di Area Eksplorasi Migas Bojonegoro Jawa Timur

Imroatul Azizah, Nurul Huda, Eko Arif Cahyono  
Dosen Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro  
iim.azizah73@gmail.com

## ABSTRAK

Praktik kapitalisasi perempuan di area eksplorasi migas di kawasan Gayam Bojonegoro sangat menarik. Praktik tersebut dimulai dari perubahan penampilan perempuan, kemudian menjalar pada tata pergaulan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama sampai dengan menjajakan dirinya karena terlanjur ternoda dan atau karena alasan ekonomi. Alasan ekonomijugadipakai oleh suami yang mengizinkan istrinya di' sewakan' kepada orang lain dan orang tuanya yang mengizinkan anaknya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma susila yang ada. Adapun hasil penelitian sebagai berikut; *Pertama*, Struktur sosial masyarakat Gayam bersifat transformatif; sebuah masyarakat yang transisional dari masyarakat tertutupmenuju masyarakat terbuka yang sedang melakukan hibridasi budaya.*Kedua*,Penyebab kapitalisasi perempuan berkeluarga yang dianggap sebagai penyimpangan sosial atau sebuah anomie yang terjadi dalam masyarakat Gayam adalah struktur sosial masyarakat Gayam yang transformatif yang menyebabkan adanya ambiguitas peran, status, dan norma yang belum disepakati secara jelas oleh masyarakat yang akhirnya berdampak pada disfungsi sosial/*social disorder*danmelahirkan ketidakadilan gender gandaserta gabungan sistem

produksi kapitalis dan ideologi patriarkhis. Sedangkan motif kapitalisasi istri/perempuan yang sudah berkeluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologis keluarga.

**Kata Kunci:** Kapitalisasi, Patriarkhi, dan  
Kebutuhan Fisiologis

## ABSTRACT

*The practice of women's capitalization in the oil and gas exploration area in the Gayam Bojonegoro is very interesting. The practice starts from changing the appearance of women, then spreading to social relations that are contrary to social and religious norms to prostituting themselves because they have been tarnished and/ or due to economic reasons. Economic reasons are also used by husbands who allow their wives to be 'leased' to others and parents who allow their children to do something that is contrary to existing moral norms. The results of the study are as follows; First, the social structure of the Gayam community is transformative; a transitional society from a closed to an open society that is conducting cultural hybridization. Second, the cause of the capitalization of married women which is considered as social irregularity or an anomie that occurs in the Gayam community is the social structure of the transformative Gayam community that causes ambiguity in roles, status, and norms that have not been clearly agreed upon by the community which ultimately impacts on social dysfunction / social disorder and cause to dua-gender injustice and a combination of capitalist production systems and patriarchal ideology. While the motive for capitalization of wife / woman who is married is to meet the physiological needs of the family.*

**Keywords:** Capitalization, Patriarchy, and Physiological Needs

## A. Pendahuluan

Young meyakini bahwa kapitalisme dan patriarki saling berkaitan, sehingga sulit untuk dijelaskan kapitalisme dan patriarki yang tidak bias gender. Kapitalisme secara esensial adalah patriarki. Dengan demikian, kapitalisasi terhadap perempuan dan dalam wujudnya sebagai pekerja sekunder secara fundamental merupakan karakteristik kapitalisme. (Tong, 2006). Bahkan patriarki dan kapitalisme merupakan penyebab utama penindasan perempuan dalam keluarga baik perempuan sebagai istri maupun sebagai anak. Secara operasional, Juliet Mitchel menjelaskan empat struktur dalam masyarakat kapitalis yang telah memposisikan perempuan pada posisi yang rendah, yaitu: peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga, reproduksi, seksualitas dan bersosialisasi dengan anak-anak. (Amin, 2013). Selanjutnya, Kapitalisasi terhadap tubuh perempuan merupakan objektivikasi. Sebagai objek, perempuan mengalami objektivikasi atas tubuhnya baik terjadi dalam keluarga maupun masyarakat, tubuh perempuan merupakan korban kapitalisasi dan komodifikasi dari kekuatan lain di luar tubuh si perempuan itu sendiri. (Benedicta, 2011).

Fenomena kapitalisasi perempuan di area eksplorasi migas di kawasan Gayam Bojonegoro sangat menarik. Pendulum kapitalisasi tersebut dapat dilihat dari perubahan penampilan perempuan sebagai dampak objektivikasi perempuan yang dimulai dari cara berbusana remaja putri mulai berani terbuka (*buka-bukaan*), kemudian merambat pada tata pergaulan yang tidak pernah dipikirkan masyarakat setempat seperti pada usia sekolah sudah berani berhubungan badan dan bahkan berani divideokan. Tahap kapitalisasi selanjutnya adalah dengan menjajakan diri karena terlanjur ternoda dan atau karena alasan ekonomi.

Alasan ekonomi juga yang dipakai oleh para suami yang mengizinkan istrinya di'sewakan' kepada orang lain.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian; *pertama*, Bagaimana struktur sosial masyarakat di area eksplorasi Migas Bojonegoro? *Kedua*, Apa faktor yang mendorong terjadinya praktik kapitalisasi di area eksplorasi Migas Bojonegoro?

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa, atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Sedangkan teori yang digunakan penulis adalah Teori fungsionalisme struktural (struktur sosial dan anomie) Robert King Merton yang digunakan untuk memotret lebih jauh hubungan antara kebudayaan, struktur, dan anomie yang terjadi dalam masyarakat Gayam Bojonegoro; dalam arti teori ini dibuat untuk melihat lebih jauh ketidakmampuan masyarakat Gayam Bojonegoro untuk bertindak sesuai norma-norma yang ada atau munculnya disfungsi/penyimpangan dalam masyarakat Gayam. Untuk mengetahui konstruksi kapitalisasi perempuan, penulis menggunakan teori *capital* milik Pierre Bourdieu untuk mengendus pertukaran beragam jenis modal mulai dari modal material, sosial, budaya hingga modal simbolik dengan jenis modal yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mengetahui lebih mendalam faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut selain struktur sosial yang mengendalikan perilaku masyarakat, penulis menggunakan teori *dual-system* dalam aliran feminis sosialis untuk mengendus penyebab penindasan perempuan tidak hanya dikarenakan sistem produksi kapitalis melainkan juga ideologi patriarkhis, dan juga menggunakan teori hirarkhi kebutuhan Abraham Maslow untuk menjelaskan motif praktik kapitalisasi tersebut

yang dihubungkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pelaku praktik kapitalisasi dalam keluarga.

## **B. Pembahasan**

### **1. Struktur Sosial Masyarakat Gayam**

Secara etimologis, struktur sosial diartikan sebagai suatu tingkatan, bangunan dalam masyarakat (Partanto & Al Barry, 1994). Sedangkan secara terminologis diartikan sebagai sekumpulan relasi sosial terorganisir yang dilakukan anggota masyarakat atau kelompok (Ritzer, 2012) yang mewujudkan dalam bagian-bagian yang tersusun secara teratur untuk membentuk satu kesatuan yang sistematis (Judistira, 1996). Bagian-bagian tersebut dapat dilihat seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial serta wewenang dan kekuasaan (Soekanto, 1983).

Adapun struktur masyarakat Gayam sebelum kedatangan proyek eksplorasi migas dapat dikategorikan sebagai masyarakat tradisional/tertutup seperti kebanyakan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang salah satu cirinya adalah menempatkan norma agama dan sosial sebagai alat kontrol dan kendali setiap perilaku individu dalam masyarakat, namun setelah adanya proyek migas yang ditempatkan di Kecamatan Gayam, ada pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik secara positif maupun negatif seperti hubungan lawan jenis yang belum mempunyai ikatan pernikahan, meningkatnya pendapatan ekonomi warga, dan sebagainya (Wawancara Emi, 20 November 2018). Namun pergeseran dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gayam tidak mengambil atau mengikuti pola yang seragam atau paling tidak mempunyai kesamaan pola yang mengarah pada modernitas (Wawancara: Zakiyah, 25 Nopember 2018).

Indikator perubahan masyarakat tradisional/tertutup dapat diukur dari beberapa faktor: *Pertama*, menuju institusi keluarga yang kecil dan diferensiasi peran; Masyarakat tertutup dicirikan dengan keluarga yang besar dan penyatuan peran, namun menurut data yang diambil dari BPS, rata-rata anggota rumah tangga (ART) di masyarakat Gayam berjumlah 3 (tiga) orang walaupun Desa Ngraho dan desa Bonorejo rata-rata anggota rumah tangganya berjumlah 4 (empat) orang (Tim BPS, 2018). Di samping itu, tersedianya banyak lembaga pendidikan di masyarakat Gayam tidak hanya berbentuk lembaga formal baik negeri maupun swasta, melainkan lembaga non-formal dan informal yang disediakan oleh partisipasi warga setempat (Tim BPS, 2018). Begitu juga tersedia lembaga kesenian, ketrampilan dan olah raga yang sudah menyebar ke seluruh desa (Tim BPS, 2018).

*Kedua*, menuju masyarakat Gayam yang produktif. Memang sesuai data BPS, Jumlah lahan persawahan dan ladang di Kecamatan Gayam cukup luas, tak heran jika mayoritas penduduknya menggantungkan kehidupannya dengan menjadi petani (Tim BPS, 2018). Selain dalam hal pertanian, masyarakat di Kecamatan Gayam juga banyak yang mengembangkan produksi dalam bidang peternakan (Tim BPS, 2018). Namun kondisi di atas tidak berkorelasi dengan adanya mentalitas permisif tanpa target yang lahir dari nilai budaya tradisional pada masyarakat Gayam karena mereka juga berupaya untuk mewujudkan banyaknya sarana dan prasarana dalam peningkatan ekonomi warga seperti lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan yang berbentuk non-bank yang ada di Kecamatan Gayam sejumlah 23 (dua puluh tiga) unit, yakni 1 (satu) bank di Desa Ringintunggal dan 22 (dua puluh dua) dalam bentuk koperasi (Tim BPS, 2018). Lembaga keuangan tersebut untuk mendukung semua jenis

usaha warga seperti pertokoan (Tim BPS, 2018), perusahaan industri kerajinan rumah tangga, dan perusahaan yang bergerak dalam bidang lain (Tim BPS, 2018).

Berpijak dari kenyataan di atas, menjadi tidak benar jika masyarakat tradisional/tertutup di negara berkembang tidak berhasil melakukan proses transformasi menuju masyarakat modern. Ketidakterhasilan proses transformasi dikarenakan adanya hambatan kultural yang mewujud dalam nilai-nilai tradisional yang sudah diinternalisasi oleh masyarakat secara baik. Pada gilirannya, internalisasi nilai tradisional berdampak pada struktur sosial yang statis yang menghambat laju perkembangan budaya, ekonomi, politik, dan sosial yang pada akhirnya menyebabkan mereka hidup dalam keterbelakangan, tidak maju, dan miskin (Smelser, 1964).

Lebih jauh lagi, internalisasi nilai tradisional juga turut membentuk sikap mental masyarakat tradisional di negara yang sedang berkembang. Nilai-nilai tradisional tersebut adalah mentalitas masyarakat yang belum siap berprestasi (*need for achievement*) dalam segala aspek. Mentalitas ini kemudian diwariskan secara turun menurun dan membentuk sebuah tradisi atau budaya miskin (*cultural of poverty*). Maka, peta kemiskinan sebenarnya muncul dari nilai budaya yang dianut mereka sendiri, yang berakar dari kondisi lingkungan yang serba miskin sehingga mereka sulit untuk bebas dari *network of poverty* (Clelland, 1961).

Namun yang perlu dikaji lebih mendalam adalah apakah dengan banyaknya bukti keberhasilan masyarakat Gayam dalam menghadapi tantangan industrialisasi memberikan indikator bahwa masyarakat Gayam benar-benar bertransformasi menjadi masyarakat modern/terbuka? Sedangkan nilai-nilai dalam industri yang merupakan perwujudan dari antroposentrisme, otonomi dan kebebasan, rasionalisme, fondasionalisme,

positivisme, dan materialisme (Gaut, 2010), adalah: *Pertama*, efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. *Kedua*, spesialisasi adalah pembidangan pekerjaan dalam masyarakat industri dalam segala tingkatan yang menuntut spesifikasi keahlian yang berbeda dan saling menunjang. *Ketiga*, rasionalisasi adalah tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dan mengarah pada satu tujuan yang disesuaikan dengan pemahaman terhadap kondisi yang mengitarinya (Brown Parker, Child, & M. A. Smith, 1990).

Berpijak dari teori tersebut di atas, sangat sulit memastikan bahwa masyarakat Gayam sudah bertransformasi menjadi masyarakat modern/terbuka dan meninggalkan kehidupan tradisional/tertutupnya. Salah seorang responden, Ibu Zy (27 Oktober 2018). menyatakan kegiatan keagamaan oleh masyarakat seperti rutinitas *tahlilan*, *istighotsah*, dan sebagainya masih berlangsung. Disamping itu, masyarakat Gayam juga masih merawat tradisinya berupa sedekah bumi dan melaksanakan tarian di tengah sawah sebelum pelaksanaan tanam padi atau yang lain." (Wawancara Emi, 15 Nopember 2018). Salah seorang tokoh masyarakat menyimpulkan:

*"Kehidupan bermasyarakat tetap berjalan dengan baik, yaitu menjalankan ibadah agama secara bersama-sama dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang melibatkan banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat. Jarang ada perselisihan atau pertengkaran di kalangan masyarakat"* (Wawancara Mr. So, 25 Oktober 2018).

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Gayam masih kental dengan agama yang sejak lama dijadikan pedoman hidupnya. Di samping itu, mereka juga masih melestarikan tradisi dan budaya yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu dan melakukan kegiatan sosial bersama-sama. Kondisi ini tentu jauh dari



kesadaran modern yang seluruh aktifitasnya didasarkan pada kesadaran diri manusia yang kemudian memantul pada paham kemanusiaan. Terkait persoalan agama, seseorang dengan kesadaran modern tentu tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidup selama bertentangan dengan pengunggulan terhadap rasio yang menjadikan manusia bisa bereksistensi dan berfikir terhadap seluruh persoalan padahal masih terjadi perkumpulan masyarakat untuk menghadiri pengajian umum di masjid dan atau musholla yang tersedia sangat banyak. Bukan hanya itu, masyarakat Gayam juga masih percaya pada dogma dan doktrin baik dalam rutinitas keagamaan maupun yang mewujud pada upacara tradisinya. Kenyataan ini tentu jauh dari kesadaran modern yang telah mengubur dogma atau kepercayaan sebagai syarat kebebasan berfikir manusia. Di samping itu, hubungan sosial kemasyarakatan juga menjadi dampak lanjutan kesadaran modern yang mendahulukan subyektifitas manusia/individualis padahal masyarakat Gayam masih melakukan kegiatan sosial yang tidak menguntungkan secara ekonomi.

Namun tidak bijak jika dikatakan masyarakat Gayam tidak terdampak dengan adanya industrialisasi atau nilai-nilai tersebut tidak terinternalisasi seperti efisiensi, spesialisasi, dan pembagian waktu. Banyaknya unit usaha yang didirikan kader posyandu dan lainnya atau proyek lain yang tumbuh setelah adanya industrialisasi tentu sangat membutuhkan nilai-nilai di atas jika menginginkan tercapainya target yang telah disepakati bersama.

Proses pertemuan nilai budaya dalam sebuah masyarakat tidak akan mengalami hambatan yang berarti jika memenuhi syarat sebagai berikut: *Pertama*, mayoritas anggota masyarakat melakukan kesepakatan terhadap nilai yang bersifat prinsipil dan fundamental (*moral contract*). *Kedua*, untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota masyarakat juga melakukan kesepakatan untuk

memproteksi nilai budaya yang dipertahankannya. *Ketiga*, mayoritas anggota masyarakat juga bersepakat tentang kohesi sosial yang mewujud dalam budaya gotong royong dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial antarkelompok sosial(Parekh, 2008).

Mengapa itu bisa terjadi di masyarakat Gayam yang nota bene-nya masyarakat tradisional/tertutup? Integrasi budaya sebenarnya tidak mengharuskan lokalisasi industri di masyarakat pedesaan secara faktual, namun adanya perkembangan internet secara massif juga disinyalir menjadi penyebab adanya proses integrasi tersebut. Namun budaya lokal juga memiliki beragam cara untuk mempertahankan eksistensinya. Sedangkan cara yang ditempuhadalah dengan pola karang(*coral pattern*); sebuah pola penyerapan isi budaya luar tanpa disertai perubahan bentuk atau mempertahankan bentuk dan mengubah isinya, sesuai dengan karakter batu karang(Lee, 1991).

Namun tidak dapat dipungkiri kemungkinan juga, sekelompok masyarakat Gayam yang menggunakan pola burung beo(*parrot pattern*); sebuah pola penyerapan secara menyeluruh dalam bentuk dan isinya. Pola ini direalisasikan oleh masyarakat tradisional dalam merespon persoalan makanan dan pakaian karena budaya lokal dinilai terlalu rumit dan kaku untuk diterapkan(Suryanti, 2007).

Kondisi tersebut menahbiskan kritik Robert K Merton terkait andaian kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat bertentangan dengan fakta karena secara faktual elemen tersebut berfungsi dalam masyarakat tertentu, atau tidak berfungsi secara keseluruhan atau disfungsi bagi masyarakat yang lain. maka, elemen disintegratif yang menyebabkan disfungsi dalam masyarakat perlu mendapatkan apresiasi yang serius disamping elemen yang berfungsi secara positif(Robert K Merton, 1967).

Adapun struktur sosial dalam keluarga mencakup beberapa elemen yang dapat menjadikan institusi keluarga sebagai sistem kesatuan; *pertama*, status sosial yang mendeskripsikan figur dalam keluarga seperti ayah pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak sekolah, remaja. *Kedua*, fungsi sosial yang mendeskripsikan peran suami/bapak yang bersifat instrumental dan peran emosional (cinta dan kasih sayang) yang dimainkan oleh figur istri/ibu. *Ketiga*, norma sosial dipahami sebagai aturan main dalam pembagian tugas sesuai dengan struktur keluarga sehingga semua bisa berjalan secara teratur (Megawangi, 1999).

Sedangkan perubahan sosial yang ditimbulkan dari urbanisasi dan industrialisasi dalam keluarga adalah sebagai berikut; *pertama*, munculnya sikap yang lebih mendukung ibu dan istri untuk bekerja. *Kedua*, struktur peran keluarga yang berubah. *Ketiga*, berkurangnya otoritas suami dan ayah. *Keempat*, berkurangnya pengaruh keluarga terhadap individu. *Kelima*, munculnya norma dan tingkah laku yang lebih longgar sehingga memicu penyimpangan yang dilakukan anggota masyarakat dan disamping itu adanya adaptasi anggota masyarakat lain dengan pemaknaan norma baru (Raho, 2007).

Dampak industrialisasi yang juga menjadi indikator masyarakat terbuka juga kita dapati pada masyarakat Gayam seperti dukungan perempuan yang sudah berkeluarga untuk beraktifitas di sektor publik dengan diperbolehkannya bekerja di luar rumah untuk membantu keuangan suami, seperti hasil wawancara berikut:

*"Tidak ada yang salah jika seorang istri memiliki penghasilan/pendapatan lebih besar daripada suaminya. Bukankah ketika laki-laki dan perempuan sudah menikah rezekinya digabungkan oleh Tuhan, dan kita tidak pernah tahu rezeki itu dititipkan lewat suami atau istri."* (Wawancara LP, 6 Nopember 2018).

Sedangkan perubahan struktur keluarga yang terkait dengan peran dan status tidak terjadi dalam masyarakat Gayam. Ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Peran istri dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak dan mengurus keluarga. Istri juga bertanggung jawab dalam mengasuh anak, bersih-bersih di rumah. Sedangkan peran suami adalah untuk bekerja dan memberi nafkah bagi istri dan anaknya.” (Wawancara Mr. So, 25 Oktober 2018)*

Pembagian kerja dan status yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menjadi indikator adanya transformasi peran gender dalam struktur sosial. Sedangkan pengambilan keputusan, distribusi kekayaan, penghasilan, kekuasaan dan prestise juga dapat dijadikan indikator terhadap perubahan status. Di samping itu, secara faktual, perempuan selalu ditempatkan dalam peran dan posisi yang tidak menguntungkan karena dianggap mempunyai status lebih rendah daripada laki-laki. Maka, perempuan akan selalu mengalami kesulitan untuk mengimbangi peran laki-laki di ranah publik karena harus bertanggung jawab di ranah domestik. Dengan begitu, kontrol budaya patriarkhi yang merupakan norma masyarakat tradisional secara umum akan menghambat transformasi sosial yang mewujud dalam pergeseran pola relasi gender (Lindsey, 1990).

Adanya perubahan status dan fungsi dalam keluarga sangat rasional jika ditilik dari proses industrialisasi namun yang terjadi bukan perubahan peran dan fungsi melainkan penambahan peran dan fungsi. Dengan demikian ketidakadilan gender yang dialami perempuan justru mendapat momentumnya dan sungguh mendapat tempat yang layak pada masyarakat yang transisional dikarenakan istri disamping terbebani dengan urusan keluarga juga terbebani dengan pekerjaan di luar untuk membantu atau

bahkan menopang keuangan keluarga. Kondisi ini terjadi pada masyarakat Gayam seperti penjelasan sebagai berikut:

*“Seorang perempuan harus sadar diri dengan tugas-tugasnya di rumah. Seorang suami bertanggungjawab untuk bekerja, sementara istri mengurus rumah tangga. Pada prakteknya perempuan membantu sang suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun saat perempuan ingin bekerja, dia harus memahami bahwa dirinya terikat dalam keluarga, otomatis harus seatas izin suami(Wawancara Sy, 7 Nopember 2018).*

Adapun berkurangnya otoritas suami pada anggota keluarga juga tidak dapat dibuktikan dalam keluarga di masyarakat Gayam. Dalam arti, suami masih menjalankan kewenangannya dalam keluarga secara otoritatif sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

*“Perempuan dapat mengikuti kegiatan diluar rumah jika diizinkan oleh suaminya. Selain itu perempuan haruslah menyelesaikan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Inilah jalan satu-satunya jika ingin berdaya.”Tugas istri itu kan menyapu, memasak, mengepel dan sebagainya. Kerjakan itu dulu nanti baru keluar” ucapnya’(Wawancara S, 31 Oktober 2018).*

Berdasarkan data tersebut di atas, pendapat Millet mendapatkan pembenaran bahwa keluarga, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern, merupakan pranata sosial dasar yang bertugas untuk membentuk dan sekaligus merawat budaya patriarkhi. Secara tidak sadar, keluarga mendorong setiap anggotanya untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat yang menganut paham patriarkhi(Mochtar, 2009).

Sedangkan longgarnya norma yang memicu penyimpangan sosial tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Dampak negatif berupa tergerusnya moral masyarakat mulai menunjukkan tanda-tandanya.Tahap awal cara berbusana*

*remaja putri mulai berani terbuka (buka-bukaan), mereka tidak lagi menjaga pergaulannya, masih usia sekolah sudah berhubungan badan dan divideokan. Tahap selanjutnya, ada yang menjajakan diri karena terlanjur ternoda dan atau karena alasan ekonomi. Alasan ekonomi juga yang dipakai oleh para suami yang mengizinkan istrinya di'sewakan'."(Wawancara SM 20 Pebruari 2018)*

Berdasarkan data di atas, menjadi benar jika industrialisasi disamping memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, juga memicu dampak negatif berupa melemahnya kesadaran kolektif masyarakat. kondisi ini pada gilirannya akan berdampak pada melemahnya kontrol sosial masyarakat sehingga individu dengan mudah dan lebih longgar melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang sudah berlaku dan sudah diinternalisasi oleh warga (Septiarti, 1994).

Kondisi di atas sesuai dengan konsep disfungsi (ketidakmampuan) Robert K Merton dalam keluarga. Struktur sosial keluarga juga dapat dikategorikan disfungsional manakala elemen-elemen dalam keluarga tidak berperan semestinya dan tumpang tindih; seorang ayah bisa disfungsi terhadap anggota-anggota keluarga lain jika tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Begitu juga, seorang ibu dapat disfungsional jika tidak menjalankan peran yang sudah disepakati. Jika hal itu terjadi dalam suatu keluarga, maka akan mengganggu sistem yang ada dalam keluarga (Ritzer, 2013).

Berpijak dari uraian di atas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa struktur sosial masyarakat Gayam tidak bisa dikategorikan sebagai masyarakat terbuka; masyarakat yang mempunyai kesadaran modernitas dan juga tidak bisa dikategorikan sebagai masyarakat tertutup; sebuah masyarakat yang masih setia dan merawat nilai-

nilai tradisional. Namun struktur sosial masyarakat gayam bersifat transformatif; sebuah masyarakat yang transisional dari masyarakat tertutup menuju masyarakat yang terbuka yang belum matang dalam melakukan hibridasi budaya.

## **2. Opresi Gender; Kapitalisasi Perempuan dalam Struktur Keluarga Patriarkhis**

Lantas, mengapa tubuh perempuan yang dikapitalisasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin pendapat Thornham dapat dipertimbangkan, dia menegaskan bahwa faktor sosial lebih dominan untuk mempengaruhi aktualisasi seksualitas manusia daripada faktor biologisnya. Yakni lingkungan masyarakat sangat dominan dalam membentuk pola sikap dan perilaku manusia serta fungsi dan peran seksual manusia. Maka, tidak mengherankan jika ungkapan seksualitas bukan hanya menyangkut persoalan biologis yang bersifat *given*, tetapi merupakan suatu bentukan atau rekayasa konstruktif yang meliputi etika, moral, dan budaya yang bersumber dari masyarakat(Thornham, 2010).

Perilaku seksualitas perempuan merupakan perpaduan antara dorongan seksual dan pengaruh sosial. Lebih dari itu, ternyata dorongan seksual juga sangat dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku. Yakni, setiap norma sosial membuat ketentuan dan batasan tentang saluran dorongan seksual. Kondisi ini selanjutnya sudah barang tentu turut membentuk pengalaman perempuan atas tubuhnya(Melliana, 2006). Selanjutnya, Konstruksi sosial tersebut tidak hanya membentuk pengalaman perempuan namun juga dijadikan pengetahuan untuk merespon terhadap laki-laki. Dengan begitu, patut diduga, Pola atau proses konstruksi sosial sudah terinternalisasi dalam masyarakat, sehingga mempersulit perempuan untuk memposisikan tubuhnya yang berbeda dengan

lingkungannya. Pada akhirnya, tubuh perempuan menjadi objek seksualitas yang dikonstruksi oleh norma sosial(Thornham, 2010).

Konsekuensinya, perempuan yang tidak mengikuti pola yang dibakukan oleh norma sosial tersebut mendapat stigma buruk sebagai perempuan yang aneh dan tulen. Konstruksi ini mengharuskan perempuan untuk memaksa dirinya “ingin menjadi cantik”. Keinginan tersebut makin lama membentuk semacam konsep *myth* yang dipercayai oleh seluruh perempuan. Mitos kecantikan mendorong perempuan untuk melihat dirinya sebagai objek yang jelas-jelas cantik secara seksual. Pengaruh kultural yang kuat ini memposisikan perempuan untuk melihat diri mereka sebagai objek seksual(Thornham, 2010). Dengan begitu, seonggok tubuh selalu ada dalam genggamannya budaya yang termanifestasikan dalam praktik budaya dan kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya, tubuh dapat dijadikan sebagai arena kontestasi berbagai ideologi untuk menjadi yang dominan seperti gender, patriarkhi, konsumerisme, kapitalisme, dan ideologi lainnya(Mochtar, 2009).

Di samping itu, eksistensi perempuan dalam konteks pemaknaan budaya juga kurang mendapatkan pengakuan atau tidak mampu untuk merepresentasikan dirinya sendiri. Kondisi ini berimplikasi pada pemisahan tugas tubuh yang tidak seimbang ke dalam sektor domestik yang dimainkan oleh perempuan dan sektor publik yang dimainkan oleh pihak laki-laki (Irawan, 1997). Perbedaan tersebut menjadi karakteristik masyarakat manapun yang menganut sistem patriarkhi; kekuasaan bapak atau kekuasaan laki-laki, yang selanjutnya relasi kuasanya dirawat dan dilanggengkan(Bhasin, 1996).

Perbedaan peran berdasarkan konstruksi budaya sebenarnya tidak perlu dirisaukan asalkan keadilan dapat diberikan kepada semua pihak atau tidak menjadi



penghalang adanya pemenuhan akses keadilan. Namun, jika perbedaan peran ternyata menjadi penghalang terhadap akses keadilan atau justru melahirkan ketidakadilan yang mewujud dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi, pembentukan *stereotype*, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) yang ditanggung oleh tubuh perempuan maka perlu dicarikan solusinya (Mansour, 1996). Adanya beban lebih pada tubuh perempuan dapat dibuktikan dengan adanya syarat keberdayaan perempuan sebagai berikut:

*“Perempuan dapat mengikuti kegiatan diluar rumah jika diizinkan oleh suaminya. Selain itu perempuan haruslah menyelesaikan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Inilah jalan satu-satunya jika ingin berdaya. “Tugas istri itu kan menyapu, memasak, mengepel dan sebagainya. Kerjakan itu dulu nanti baru keluar” ucapnya’ (Wawancara Suniti, 31 Oktober 2018).*

Perempuan yang ingin mengaktualisasikan dirinya di sektor publik harus menanggung beban lebih sebagai syarat mendapatkan ijin suaminya padahal tugas istri yang diyakini masyarakat bukan untuk mencari nafkah. Untuk memenuhi standar keadilan mestinya lahir transposisi secara otomatis sehingga tidak membebani kaum perempuan. Dalam arti, laki-laki yang tidak mampu menjalankan tugas pokoknya sebagai pencari nafkah harus berpindah tugas pada sektor domestik keluarga sedangkan perempuan berpindah tugas pada sektor publik.

Pemaknaan atas tubuh perempuan dalam budaya konsumenseseuai dengan konsep *capital* (modal) milik Pierre Bourdieu yang diperlebar tidak hanya berupa aset material melainkan juga dapat berupa modal sosial, modal budaya, atau modal simbolik (Bourdieu, 1986). Lebih jauh, menurut Pierre Bourdieu bahwa beragam jenis modal mulai dari modal sosial, modal budaya hingga modal simbolik dapat ditukarkan dengan jenis modal yang lain

untuk mendapatkan keuntungan. Yakni seonggok tubuh merupakan modal fisik juga dapat ditukarkan dengan modal lain atau dapat dikonversikan menjadi modal ekonomi, budaya dan sosial yang menguntungkan (Shilling, 1970). Pertukaran modal yang tidak hanya dimaknai secara konvensional oleh Pierre Bourdieu mendapatkan legitimasinya di masyarakat Gayam dalam bentuk eksploitasi tubuh perempuan.

*“Kebiasaan yang demikian sudah terjadi sejak dulu, bahkan sejak kecil hal tersebut sudah biasa terjadi dikalangan masyarakat terutama di kalangan para pemimpin setempat. Biasanya yang terjadi adalah adanya pertukaran pasangan suami istri dengan pasangan suami istri yang lain. Hal itu sudah biasa dan menjadi rahasia umum di masyarakat” (Wawancara Mr. So, 25 Oktober 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut, memberikan penegasan tentang praktik pertukaran modal yang tidak biasa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Gayam jauh sebelum adanya pengeboran minyak dikarenakan kemiskinan. Tubuh perempuan bisa dijadikan alat pertukaran modal untuk mendapatkan modal aset berupa uang. Tubuh perempuan tersebut baik dilakukan oleh seorang istri maupun anak perempuan.

Untuk memastikan adanya penindasan gender dalam keluarga, perlu kiranya penulis mendasarkan pada karya Friedrich Engels (1884), *The Origin of the Family, Private Property, and the State* yang dijadikan konsep subordinasi perempuan dalam struktur rumah tangga (*household*) yang terhubung dengan sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif. (Benhabib & Cornell, 1987) Keluarga tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial belaka namun sebagai unit ekonomi yang melembaga. Selanjutnya pekerjaan perempuan di rumah yang tidak punya nilai

menjadi penyokong tegaknya sistem ekonomi kapitalisme. Berdasarkan pandangan ini pula, keluarga dipahami sebagai kekuatan yang menyokong sistem ekonomi kapitalisme (Tangdilintin, 1999).

Teori *dual-system* lahir untuk mengoreksi keterbatasan tesis ketertindasan perempuan yang hanya disebabkan relasi pekerjaan perempuan dengan sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif. Substansi teori ini berhasil mengendus penyebab penindasan perempuan tidak hanya dikarenakan sistem produksi kapitalis melainkan juga ideologi patriarkhis (Eisenstein, 1979). Dengan begitu, penindasan perempuan berasal dari *basic structur* dan *supra structur* sekaligus (Jaggar, 1983). Kondisi tersebut kemudian mengkonstitusi ketertindasan kesadaran perempuan yang akan menyulitkan agenda emansipasi perempuan dari alienasi yang mendalam kecuali dengan melakukan transformasi kesadaran perempuan itu sendiri (Jaggar, 1983).

Perkawinan dalam keluarga patriarkhis menjadikan relasi perempuan dengan lawan jenisnya dalam posisi subordinat dan berusaha untuk keluar dari jebakan sistem yang menindasnya namun laki-laki menjadi penguasa yang superior dikarenakan sumber, hak, dan keistimewaan yang dimilikinya juga secara tidak sadar selalu ingin mempertahankannya (Scanzoni, 1982). Begitu juga, istri mengalami evolusi fungsi yang dimulai sebagai *property* (perempuan sebagai kekayaan suaminya), *complement* (perempuan sebagai pelengkap yang hak-haknya mulai meningkat), dan sampai *junior partners* (perempuan sebagai sahabat/mitra kecil suami sehingga kalau dibutuhkan keluarga, dia mau melakukan bekerja sambil di luar rumah, di samping melakukan kewajiban rumah tangga) (Scanzoni, 1982). Kondisi

tersebut akan berevolusi menuju kemitraan yang penuh; istri tidak melakukan kewajiban rumah tangga/*senior partners*(Scanzoni, 1982).

Penindasan perempuan baik struktural maupun kultural dilatar belakangi oleh ideologi patriarki yang memosisikan laki-laki pada level yang dominan sedangkan perempuan diposisikan pada level yang subordinat yang terinternalisasi dengan baik sehingga melahirkan katagori subyek dan obyek dalam keluarga(Galtung, 1996). Kondisi ini kemudian melahirkan ragam eksploitasi kepada perempuan sebagai bagian inheren dalam penindasan perempuan secara struktural dan dominasi laki-laki/subordinasi perempuan sebagai bagian dari penindasan perempuan secara kultural yang terus mengalami persebaran secara ekstensif sehingga melahirkan sinergisitas antara kekuasaan dan kebutuhan penindasan(Galtung, 2000). Selanjutnya, penindasan dan peminggiran perempuan juga mendapat legitimasi budaya yang sebenarnya secara fitrah perempuan dapat diposisikan sebagai makhluk yang setara(Galtung, 1996). Posisi institusi keluarga yang tidak hanya dijadikan sebagai lembaga sosial melainkan lembaga penopang ekonomi mendapatkan pembenarannya dalam tradisi masyarakat Gayam sebagai berikut:

*“Perempuan dapat mengikuti kegiatan diluar rumah jika diizinkan oleh suaminya. Selain itu perempuan haruslah menyelesaikan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Inilah jalan satu-satunya jika ingin berdaya.”Tugas istri itu kan menyapu, memasak, mengepel dan sebagainya. Kerjakan itu dulu nanti baru keluar” ucapnya’(Wawancara Suniti, 31 Oktober 2018).*

Hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan dengan gamblang tentang lembaga keluarga yang dibajak sebagai institusi penopang ekonomi kapitalis yang bertumpu

pada akumulasi modal dengan tidak adanya penghargaan masyarakat terhadap tugas 'pokok' perempuan yang dipandang remeh dan tidak bernilai padahal pekerjaan domestik dapat dikonversi secara ekonomi; artinya laki-laki harus memahami bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan yang secara gratis bisa dijadikan pengurang pengeluaran anggaran rumah tangga, maka anggapan pekerjaan yang bernilai itu tidak hanya pekerjaan disektor publik. Namun anggapan ini selalu dirawat dan dilanggengkan karena dapat mendorong terjadinya akumulasi modal secara signifikan.

Puncak operasi perempuan yang terjadi pada masyarakat Gayam adalah dengan dijadikan tubuh perempuan sebagai alat tukar dalam ekonomi kapitalis sebagai berikut:

*"Perempuan bukanlah barang yang bisa diperjualbelikan begitu saja. Namun apa kenyataan yang ada di masyarakat justru malah hal seperti itu bukan karena keinginannya melainkan karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebiasaan yang demikian sudah terjadi sejak dulu, bahkan sejak kecil hal tersebut sudah biasa terjadi dikalangan masyarakat terutama di kalangan para pemimpin setempat. Biasanya yang terjadi adalah adanya pertukaran pasangan suami istri dengan pasangan suami istri yang lain. Hal itu sudah biasa dan menjadi rahasia umum di masyarakat"*(Wawancara Mr. So, 25 Oktober 2018).

Pernyataan ini selaras dengan pengakuan salah satu responden yang menyatakan:

*"Saya perbolehkan istri saya untuk berhubungan dengan orang lain supaya ada tambahan pemasukan ekonomi"*(Wawancara Mr. A, 13 Juli 2017).

Wawancara tersebut sedang menegaskan bahwa tubuh perempuan secara langsung dan terang-terangan dipaksa menjadi lokus penindasan dalam sistem kapitalis

dan ideologi patriarkhi. Dalam arti penindasan perempuan tidak hanya berhenti pada lembaga keluarga namun perempuan masih “disuruh” dan “dipaksa” untuk membantu menopang ekonomi keluarga secara gratis pula dengan ijin yang tidak mudah karena akan melahirkan stigma negatif padahal perempuan bisa mempunyai *bargaining* yang setara dengan memberikan hasil kerjanya dengan sistem hutang yang ditanggung oleh pihak suami atau seorang bapak dalam keluarga.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa perselingkuhan antara struktur masyarakat transformatif, sistem ekonomi kapitalis dan ideologi patriarkhis yang membenamkan dan mengakibatkan penindasan perempuan; yakni opresi perempuan dalam keluarga tidak hanya terjadi pada masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup melainkan justru perempuan mengalami penindasan secara sporadis pada masyarakat transformatif.

### **3. Motif Kapitalisasi Perempuan dalam Keluarga Di Kecamatan Gayam**

Secara makro, elemen-elemen dalam struktur sosial seperti adat istiadat, gagasan, keyakinan, dan sebagainya secara faktual tidak seluruhnya memiliki fungsi positif atau disfungsi seperti adat istiadat yang mengatur tata perilaku seseorang dalam masyarakat tidak jarang kontraproduktif; menjadikan seseorang dalam tekanan hebat dan kalau tidak mampu mengatasinya, seseorang tersebut mencoba melakukan bunuh diri (Ritzer, 2012).

Disfungsi tersebut selanjutnya melahirkan gejala yang dinamakan anomie yang menurut Merton dikarenakan adanya perubahan struktur sosial dan struktur budaya yang menjadi lingkungan hidup setiap individu. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membutuhkan

penyelarasan yang seimbang namun jika seorang individu dengan kapasitas yang ditentukan struktur sosial tiba-tiba kehilangan kemampuan menyelaraskan tindakannya dengan norma-norma dan tujuan budaya, maka ia akan mengalami apa yang disebut *anomie*. Dengan begitu, *anomie* terjadi bila struktur budaya tidak lagi berjalan selaras dengan dan didukung oleh struktur sosial yang berlaku (R K Merton, 1957).

Secara mikro, Merton juga mengajukan konsep disfungsi dalam pranata sosial khususnya dalam keluarga. Suatu pranata sosial selain menimbulkan dampak positif juga bersifat negatif seperti seorang ayah bisa disfungsi dalam keluarga karena ia tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Kondisi ini akan mengganggu sistem yang ada dalam keluarga dan selanjutnya membuat ketidakseimbangan dalam ekonomi keluarga (Ritzer, 2013). Pendek kata, struktur keluarga dalam masyarakat disinyalir dapat menjadikan institusi keluarga sebagai sistem kesatuan dan fungsional jika elemen-elemen dalam struktur sosial dapat berfungsi secara baik. Namun sebaliknya, jika fungsi antara satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih, maka sistem keluarga akan mengalami ketidakseimbangan (Megawangi, 1999).

Munculnya *anomie* yang merupakan penyimpangan sosial dalam masyarakat Gayam salah satunya mewujudkan dalam bentuk praktik kapitalisasi. Tukar menukar istri yang dilakukan oknum masyarakat Gayam juga diamini oleh banyak masyarakat dan sekaligus disesalkan masyarakat karena mencederai kemanusiaan dan bertentangan dengan norma sosial dan agama. Itu semua mungkin dikarenakan adanya akselerasi sosial yang dipaksakan kepada masyarakat lewat industrialisasi proyek eksplorasi Migas

yang tentu membutuhkan kesiapan sosial yang matang. Industrialisasi menyediakan gambaran kehidupan modern yang sukses dalam kepemilikan materi yang kemudian mengilhami seluruh masyarakat Gayam. Penyimpangan sosial tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kondisi tersebut patut diduga sebagai dampak negatif berupa tergerusnya moral masyarakat mulai menunjukkan tandatandanya. Tahap awal cara berbusana remaja putri mulai berani terbuka (buka-bukaan), mereka tidak lagi menjaga pergaulannya, masih usia sekolah sudah berhubungan badan dan divideokan. Tahap selanjutnya, ada yang menjajakan diri karena terlanjur ternoda dan atau karena alasan ekonomi. Alasan ekonomi juga yang dipakai oleh para suami yang mengizinkan istrinya di’sewakan’.” (Wawancara SM, 20 Pebruari 2018).*

Namun demikian, pendulum adanya *anomie* ternyata bukan hany akarena industrialisasi. Praktik kapitalisasi juga sudah dilakukan sebagian masyarakat jauh sebelum adanya proyek pembangunan Migas di Gayam. Salah seorang tokoh masyarakat, Mr So menyatakan bahwa pertukaran antar pasangan suami istri telah menjadi menjadi hal biasa dan rahasia umum. (wawancara, 25 Oktober 2018).

Dengan demikian, penyebab kapitalisasi perempuan dalam keluarga yang dianggap sebagai penyimpangan sosial atau sebuah anomi yang terjadi dalam masyarakat Gayam tidak lain dan tidak bukan lahir dari struktur sosial masyarakat Gayam yang transformatif; transisi dari masyarakat tertutup menuju masyarakat terbuka yang menyebabkan ambiguitas peran, status, dan norma yang belum disepakati secara jelas oleh masyarakat yang berdampak pada adanya disfungsi sosial/*social disorder* yang kemudian melahirkan ketidakadilan gender.

Namun, tidak bijak jika seluruh tindakan atau perilaku anggota keluarga yang masuk katagori penyimpangan



sosial selalu hanya diorientasikan pada struktur sosial yang obyektif dan irrasional, maka untuk mendapatkan gambaran yang jelas, peneliti juga mencoba memposisikan tindakan anggota keluarga sebagai tindakan yang subyektif dan rasional dengan pendekatan motivasi dan kondisi yang mengitarinya.

Perilaku manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara individual mulai faktor hedonistik (kecenderungan untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan); naluri (suatu kekuatan biologis bawaan yang mempengaruhi anggota tubuh untuk berlaku dengan cara tertentu dalam keadaan tepat); reaksi yang dipelajari (berdasarkan pola dan tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan ditempat orang itu hidup); atribusi (sebuah tafsir terhadap peristiwa dan faktor yang mempengaruhinya); hingga faktor kebutuhan (tindakan manusia sebenarnya selalu diorientasikan pada pemenuhan kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis)(Shaleh, 2008).

Sedangkan motif diartikan sebagai rangsangan atau dorongan bagi munculnya tindakan manusia yang dipicu oleh kebutuhan dan diorientasikan pada pencapaian tujuan dimaksud sehingga melahirkan kepuasan(Alex, 2003). Setiap orang mempunyai kebutuhan baik fisik maupun psikis dan baik dalam skala primer, sekunder maupun tersier. Kebutuhan keluarga tradisinal mewujud dalam sandang, papan, dan pangan namun bagi keluarga modern juga ditambahkan kebutuhan pemenuhan kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi, dan komunikasi(Mufidah, 2008). Seluruh kebutuhan tersebut tentu dirancang dengan pertimbangan kebutuhan yang berbeda yang didasarkan pada perbedaan gender secara kodrati antara laki-laki dan perempuan yang dikenal

dengan kebutuhan gender praktis(Mufidah, 2008).

Abraham Maslow menjelaskan bahwa memahami perilaku manusia dapat dikorelasikan dengan kebutuhan yang sedang diupayakan. Argumentasi teori kebutuhan tersebut adalah: *Pertama*, "berkeinginan" merupakan sifat manusia; *Kedua*, manusia selalu mengelola kebutuhan secara berjenjang (hirarkhis); *Ketiga*, aktualitas kebutuhan manusia pada jenjang paling tinggi tergantung pemenuhan kebutuhan manusia pada jenjang di bawahnya atau pemenuhan kebutuhan pada jenjang paling bawah menjadi pemicu pemenuhan kebutuhan di atasnya(Santoso, 2010).

Sedangkan 5 (lima) kebutuhan manusia secara hirarkhis sebagai berikut; *Pertama*, kebutuhan fisik (*Physical Needs*). Kebutuhan ini berkorelasi dengan kondisi tubuh seperti sandang, pangan, dan papan. *Kedua*, kebutuhan rasa aman (*Safety Needs*). Kebutuhan ini berkorelasi dengan psikologi individu seperti garansi keamanan dan perlakuan adil. *Ketiga*, kebutuhan sosial (*Social Needs*). Kebutuhan ini berkorelasi dengan psikologi sosial seperti saling menolong dan silaturahmi. *Keempat*, kebutuhan penghargaan (*Esteem Needs*). Kebutuhan ini berkorelasi dengan prestasi dan prestise manusia seperti mendapat penghargaan dan kepercayaan. *Kelima*, kebutuhan aktualisasi diri (*Self Actualization*). Puncak kebutuhan ini berkorelasi dengan tingkat rasionalitas seseorang(Santoso, 2010).

Motif tindakan manusia seperti kapitalisasi perempuan tentunya tidak bijak jika hanya dikorelasikan dengan struktur sosial yang tidak selaras dengan struktur budaya. Karena tindakan tersebut dapat dikorelasikan dengan berbagai faktor yang lahir dari internal manusia. Pada masyarakat Gayam, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi alasan utama. Berangkat dari data tersebut di atas, peneliti ingin menegaskan bahwa kebutuhan fisiologis menjadi isu utama dalam praktik

kapitalisasi istri/perempuan yang berkeluarga; dalam arti untuk memenuhi kebutuhan fisik keluarga atau kebutuhan fisiologis bukan kebutuhan rasa aman, kebutuhan diterima, kebutuhan dihargai, atau bahkan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan keamanan, sosial, dan penghargaan akan tereleminasi dengan sendirinya manakala kapitalisasi masih dianggap sebuah pelanggaran terhadap norma dan etika sosial. Kenyataan ini dapat dilihat dari pernyataan warga sebagai berikut:

*“Sedangkan dampak kapitalisasi perempuan dalam masyarakat, nama baik dari keluarga itu akan menjadi tidak baik, dan akan menjadi gunjingan para tetangga.” (Wawancara Lia Puspita, 6 Nopember 2018).*

Pelaku praktik kapitalisasi dalam relasi sosial akan kehilangan rasa ketentraman, kenyamanan, atau bahkan keamanan pribadi. Pelaku akan mendapatkan rangkaian stigma dan teror sosial bahkan tidak diterima oleh masyarakat. Sedangkan motif aktualisasi diri bertentangan dengan kondisi masyarakat yang sedang dalam transformasi yang menyebabkan hilangnya kapital baik ditinjau dari segi ekonomi maupun berupa modal sosial.

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa disamping struktur sosial sebagai faktor eksternal yang menyebabkan lahirnya praktik kapitalisasi, motif kapitalisasi istri dan anak perempuan dalam keluarga di Kecamatan Gayam adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologis keluarga.

### **C. Simpulan**

Struktur sosial masyarakat Gayam bersifat transformatif; sebuah masyarakat yang transisional dari masyarakat tertutup; sebuah masyarakat yang masih setia dan merawat nilai-nilai tradisional, menuju masyarakat yang

terbuka; sebuah masyarakat yang mempunyai kesadaran modernitas, yang sedang melakukan proses hibridasi budaya. Penyebab kapitalisasi perempuan berkeluarga yang dianggap sebagai penyimpangan sosial atau sebuah anomie yang terjadi dalam masyarakat Gayam lahir dari struktur sosial masyarakat Gayam yang transformatif yang mendorong adanya ambiguitas peran, status, dan norma yang belum disepakati secara jelas oleh masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada disfungsi sosial/*social disorder* yang kemudian melahirkan ketidakadilan gender ganda serta gabungan sistem ekonomi kapitalis dan ideologi patriarkhi. Sedangkan motif kapitalisasi istri/perempuan yang sudah berkeluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologis keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex, S. (2003). Psikologi umum. Bandung: Pustaka Setia.
- Benhabib, S., & Cornell, D. (1987). *Feminism as Critique: On the Politics of Gender Minneapolis*. University of Minnesota Press.
- Bhasin, K. (1996). Menggugat Patriarkhi. In *Yayasan Bentang Budaya*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Handbook of theory and research for the sociology of education. JG Richardson. *New York, Greenwood, 241(258)*, 19.
- Brown Parker, Child, J., & M. A. Smith. (1990). *Sosiologi Industri*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Clelland, D. C. (1961). *The Achieving Society*. New York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Eisenstein, Z. R. (1979). *Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism*. Monthly Review Press.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization* (Vol. 14). Sage.
- Gartung, J. (2000). Local Authorities as Peace Factors/Actors/Workers. *Journal of World-Systems Research*, 6(3), 860-872.
- Gaut, W. (2010). *Filsafat Postmodernisme J. F. Lyotard: Tesis-tesis Kunci & Masalah Status Pengetahuan Ilmiah*. Flores: Ledalero.
- Irawan, A. (1997). *Sangkan Peran Jender*. Yogyakarta: Pustaka pelajar untuk PKK UGM.
- Jaggar, A. M. (1983). *Feminist politics and human nature*. Rowman & Littlefield.

- Judistira, K. (1996). *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*. Universitas Padjadjaran.
- Lee, P. S. N. (1991). The absorption and indigenization of foreign media cultures a study on a cultural meeting point of the east and west: Hong Kong. *Asian Journal of Communication*, 1(2), 52-72.
- Lindsey, L. L. (1990). *Gender roles: A sociological perspective*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mansour, F. (1996). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 7-8.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan berbeda?: Sudut pandang baru tentang relasi gender*. Mizan.
- Melliana, A. (2006). Menjelajah tubuh perempuan dan mitos kecantikan. Yogyakarta: Lkis.
- Merton, R K. (1957). *Social Theory and Social Structure* (Glencoe, Illinois, Free Press). *Merton Social Theory and Social Structure* 1957.
- Merton, Robert K. (1967). *On theoretical sociology*. Free Press New York.
- Mochtar, J. (2009). *Tubuh Perempuan dalam Budaya Konsumen*. Jakarta: FIB UI.
- Mufidah, C. H. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Parekh, B. (2008). *A new politics of identity: Political principles for an interdependent world*. Macmillan International Higher Education.
- Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). Kamus ilmiah populer. Surabaya: Arkola, 37, 23.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 11, 25.
- Ritzer, G. (2013). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda, Cet. 10*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Santoso, S. (2010). *Teori-teori psikologi sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Scanzoni, J. (1982). *Sexual bargaining: Power politics in the American marriage*. University of Chicago Press.
- Septiarti, S. W. (1994). *Transformasi Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Strukturalisme-Fungsionalisme Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cakrawala Pendidikan.
- Shaleh, A. R. (2008). *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Prenada Media.
- Shilling. (1970). *The body and difference*. In *Identity and difference*. London: Sage.
- Smelser, N. (1964). *Toward Theory of Modernization*. In *Social change: sources, patterns, and consequences*. New York: Basic Books.
- Soekanto, S. (1983). *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suryanti, E. (2007). *Antisipasi Strategis Perang Nilai Budaya Lokal di Area Global*. Yogyakarta: Bappeda Provinsi DIY.
- Tangdilintin, P. (1999). *Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan*. In *Bunga Rampai Sosiologi Kelurga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thornham, S. (2010). *Teori feminis dan cultural studies: Tentang relasi yang belum terselesaikan*. Jalasutra.

Tim BPS. (2018). *Kecamatan gayam dalam Angka 2018*.  
Bojonegoro.

Wawancara dengan Emi, warga Desa Mojodelik, pada  
tanggal 20 Nopember 2018.

Wawancaradengan H. Zainuri, Tokoh Agama, padatanggal  
5 Nopember 2018

Wawancara dengan Lia Puspita, Guru, pada tanggal 6  
Nopember 2018

Wawancara dengan Mr. A, Warga Masyarakat Mojodelik  
pada tanggal 13 Juli 2017.

Wawancara dengan Mr. So, Tokoh Masyarakat, pada  
tanggal 25 Oktober 2018.

Wawancara dengan Siti Muamalah, seorang guru di  
Mojodelik pada tanggal 20 Pebruari 2018.

Wawancara dengan Suniti, Kader Posyandu, pada tanggal  
31Oktober 2018.

Wawancara dengan Suyono, Kepala Dusun Sugo, pada  
tanggal 7 Nopember 2018.

Wawancara dengan Zakiyah, warga Desa Beged, pada  
tanggal 25 Nopember 2018.